



**SIKAP POLITIK PW IPNU TERHADAP KHITTAH NU PADA
PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2018**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.)

Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

Farid Nur Rohman

NIM. 3312415053

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

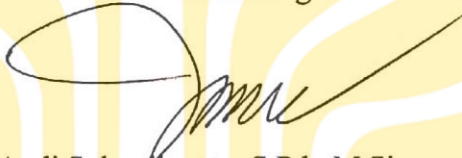
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan sidang panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Juli 2019

Dosen Pembimbing I



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197610112006041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan PKn



Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Sikap Politik PW IPNU Terhadap Khittah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018" telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juli 2019

Penguji I

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 196101271986011001

Penguji II

Erisandi Astitama, S.IP., M.A.
NIP. 198705012018031001

Penguji III

Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197610112006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Mon. Solichatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 10 Mei 2019



Farid Nur Rohman

NIM. 3312415053



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Tidak ada lebih penting dari politik kecuali kemanusiaan. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga (KH. Abdurrahman Wahid / Gus Dur)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu beserta keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayangnya
2. Kyai Agus Ramadhan, S.Pd.I beserta keluarga yang telah memberikan bimbingannya di PP Durrotu Aswaja
3. Guru, Ustadz, dan Almamaterku
4. Sahabat-sahabatku Ilmu Politik UNNES dan kange-
mbake semua di Ponpes Durrotu Aswaja
5. Segenap dosen dan keluarga besar Jurusan Politik dan
Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang
6. Rekan-rekanita PKPT IPNU IPPNU UNNES dan
rekan-rekanita IPNU IPPNU Se-Jawa Tengah

SARI

Rohman, Farid Nur. 2019. *Sikap Politik PW IPNU terhadap Khittah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Pembimbing I Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. 101 halaman. Kata kunci : Sikap Politik, Khittah NU, Pemilihan Gubernur.

Eksistensi Nahdlatul Ulama memiliki pengaruh dalam perpolitikan di Indonesia karena Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Sikap Politik PW IPNU pada Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah mencerminkan organisasi Nahdlatul Ulama dalam menghadapi ajang demokrasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) mengetahui Sikap Politik PW IPNU Jawa Tengah terhadap Khittah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, dan (2) mengetahui keterlibatan pengurus PW IPNU Jawa Tengah pada pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi, dan dokumentasi. Penelitian berfokus pada sikap politik PW IPNU dan keterlibatan pengurus dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Data dianalisis menggunakan analisis interaktif yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data penelitian dilakukan dengan metode triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan organisasi PW IPNU berpegang teguh pada Khittah NU yang menjadi garis perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi dibawah naungan Nahdlatul Ulama. Khittah NU menegaskan bahwa organisasi NU tidak boleh dilibatkan dalam kepentingan politik praktis. Menghadapi pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 PW IPNU Jawa Tengah secara organisasi tidak mengeluarkan pernyataan sikap apapun. Namun pengurus PW IPNU Jawa Tengah terlibat dalam politik praktis dengan turut serta membantu kampanye salah satu calon kandidat yang berkompetisi pada pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018. Dukungan dilandasi atas dasar rasa tanggung jawab moral terhadap kader Nahdlatul Ulama yang menjadi salah satu kandidat calon. Dalam rangka menjalankan Khittah NU maka pengurus PW IPNU Jawa Tengah membentuk organisasi relawan sebagai wadah untuk mengkampanyekan kandidat calon tersebut yaitu Aliansi Remaja Mencintai Ida Fauziyah (ARMI) dan Kita Muda Jateng. Melalui organisasi tersebut pengurus PW IPNU Jawa Tengah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengajak pemilih pemula menggunakan hak suaranya dan memberikan suaranya kepada kandidat yang di dukung oleh PW IPNU Jawa Tengah. Adanya penelitian ini memberikan sumbangan kajian ilmu politik di Indonesia yang memuat pengetahuan mengenai sikap politik dari organisasi kepemudaan dan sekaligus organisasi sosial keagamaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

Saran, perlu dilakukan sosialisasi terhadap pengurus IPNU ditingkatan bawah agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap sikap yang telah diputuskan dan perlu adanya perjanjian dengan calon yang didukung apabila terpilih.


PRAKATA

Puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Sikap Politik PW IPNU terhadap Khittah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018" dapat selesai dengan baik. Berbagai pihak telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara fisik maupun psikis. Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah membarikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di kampus Universitas Negeri Semarang;
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, MA Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas sarana yang telah disediakan;
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan pengarahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi;
4. Bapak Moh Aris Munandar, S.Sos., M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan dalam menempuh studi;
5. Bapak Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si, Dosen Pembimbing sekaligus dosen wali penulis yang telah meluangkan waktu membimbing dan membantu penulis menyelesaikan skripsi;
6. Saudara Ferial Farkhan Ibnu Ahmad, Ketua Pimpinan Wilayah IPNU Propinsi Jawa Tengah yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian;

7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa restunya demi kesuksesan belajar penulis;
8. Teman-teman semua tanpa terkecuali khususnya Ilmu Politik angkatan 2015 yang telah kebersamai penulis menimba ilmu, teman - teman KKN Alternatif IIA Desa Leyangan yang telah bersedia bekerja sama, serta teman - teman Santri Pondok Pesantren Durrotu Aswaja yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini;

Semarang, 10 Mei 2019


Farid Nur Rohman
NIM. 3312415053

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR	
2.1 Tintauan Pustaka	11
2.1.1 Sikap Politik	11
2.1.2 Perilaku dan Partisipasi Politik	19
2.1.3 Khittah Nahdlatul Ulama	21
2.1.4 Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Tengah	30
2.1.5 Pemilihan Gubernur	34
2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan	38

2.3 Kerangka Berfikir.....	39
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Latar Penelitian	43
3.2 Fokus Penelitian	45
3.3 Sumber Data.....	45
3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data	47
3.5 Uji Validitas Data.....	48
3.6 Teknis Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	53
4.1.1 Profil Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama	55
4.1.2 PW IPNU Jawa Tengah	61
4.2. Hasil Penelitian	67
4.2.1 Sikap Politik PW IPNU Terhadap Khjttah NU dalam Kaitannya dengan Kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.....	67
4.2.2 Keterlibatan Pengurus PW IPNU Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018	86
4.2.2.1 Aliansi Remaja Mencintai Ida Fauziah	90
4.2.2.2 Kita Muda Jateng	94
4.3. Pembahasan	101
4.3.1 Pembahasan Sikap Politik PW IPNU Terhadap Khjttah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.....	101
4.3.2 Pembahasan Keterlibatan PW IPNU Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018	106

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan110
5.2 Saran.....111

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



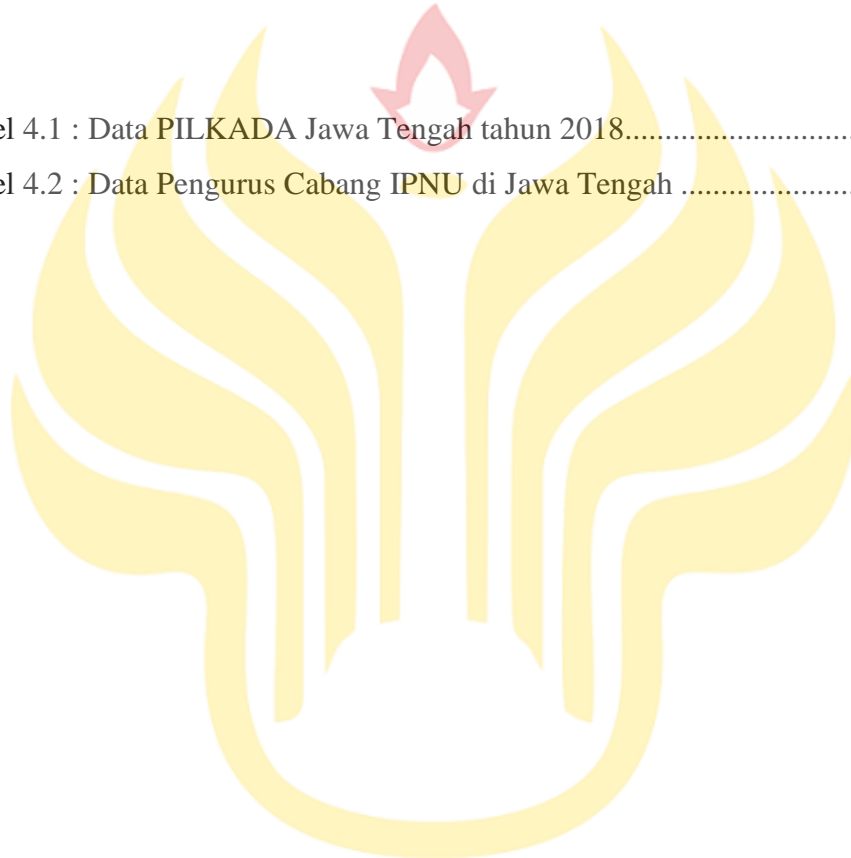
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir	42
Gambar 3.1 : Bagan Analisis Data Interaktif	52
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi IPNU	60
Gambar 4.2 : Ketua PW IPNU Jawa Tengah Memberikan Sambutan dalam Acara Konsolidasi Hj. Ida Fauziyah dengan PW IPNU IPPNU Jawa Tengah	68
Gambar 4.3 : Partisipasi PW IPNU Jawa Tengah pada Diskusi Tematik Rebonan di Markas Perjuangan Sudirman Said - Ida Fauziyah.....	70
Gambar 4.4 : IPNU turut serta dalam acara Cak Imin Sahur Bersama Aktivis NU Se-Jawa Tengah	71
Gambar 4.5 : Logo ARMI.....	91
Gambar 4.6 : Deklarasi Aliansi Remaja Mencintai Ida Fauziah (ARMI) for Wagub Jateng 2018-2023	95
Gambar 4.7 : Media Sosialisai Visi Misi ARMI.....	94
Gambar 4.8 : Pengurus PW IPNU Jawa Tengah, Sibakhul Choir menjadi Panitia dalam Acara Ngabuburit Bareng Sabyan Gambus dan Mbak Ida .	96
Gambar 4.9 : Pengurus PW IPNU Jawa Tengah dan PC IPNU Kendal menjadi Panitia pelaksana Peringatan Nuzulul Qur'an bersama Hj. Ida Fauziyah.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data PILKADA Jawa Tengah tahun 2018.....	54
Tabel 4.2 : Data Pengurus Cabang IPNU di Jawa Tengah	60



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
2. Surat Izin Observasi Awal
3. Surat Izin Penelitian
4. Instrumen Penelitian
5. Foto Penelitian
6. Biografi Responden



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi untuk kaum intelektual muda Nahdlatul Ulama khususnya bagi yang berada pada usia pelajar yaitu usia 13 - 27 tahun. Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 di Semarang dibawah pimpinan Tolchah Mansoer. IPNU adalah organisasi yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IPNU mempunyai kepengurusan dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Pimpinan Pusat IPNU merupakan kepengurusan IPNU di tingkat Nasional dengan sebutan PP IPNU. Pimpinan Wilayah IPNU merupakan kepengurusan IPNU di tingkat propinsi dengan sebutan PW IPNU. Pimpinan Cabang IPNU merupakan kepengurusan IPNU di tingkat Kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, adapun sebutannya adalah PC IPNU. Pimpinan Anak Cabang merupakan kepengurusan IPNU pada tingkat kecamatan dengan sebutan PAC IPNU. Pimpinan Ranting adalah kepengurusan IPNU pada tingkat desa / kelurahan. Pimpinan Komisariat merupakan kepengurusan IPNU pada tingkatan sekolah. Pimpinan Komisiaat Perguruan Tinggi (PKPT) adalah kepengurusan IPNU untuk tingkatan perguruan tinggi.

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama memiliki keanggotaan yang luas cakupannya, yaitu meliputi santri pondok pesantren, pelajar di tingkat

SLTP/ sederajat, pelajar di tingkat SLTA/ sederajat, pelajar di wilayah desa/ kelurahan, hingga mahasiswa di perguruan tinggi. IPNU memiliki basis kekuatan yang besar, yaitu kekuatan Islam / agama, NU, dan juga massa di setiap kabupaten/kota. Namun sesuai dengan khittah Nahdlatul Ulama, IPNU yang merupakan badan otonom dari Nahdlatul Ulama maka tidak boleh untuk terlibat dalam bagian politik praktis. Nahdlatul Ulama merupakan bukan organisasi politik dan tidak mengurus tentang politik praktis. Hal itu tersampaikan pada Khittah Nahdlatul Ulama 1926. Uraian mengenai khittah Nahdlatul Ulama menerangkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai *jam'iyah* secara organisatoris tidak terikat dengan dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun (Ubaid dan Bakir, 2015 : 230). Namun terlepas dari organisasi, setiap anggotanya bebas untuk menyatakan sikapnya terhadap politik praktis.

IPNU adalah badan otonom Nahdlatul Ulama, maka gerak dan arah organisasinya tidak boleh berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir pada 31 Januari 1926 dalam pertemuan para ulama tertemukan di tanah air pada saat itu yaitu KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH Bisri Samsuri, KH. R. Asnawi, KH. Makshum, KH. Nawawi, KH. Ridhwan, H. Abdul Fiqih, dan H. Abdul Halim. Pertemuan tersebut untuk membicarakan langkah konkret yang perlu diambil dalam menghadapi tantangan dimana Ibnu Saud yang merupakan penguasa tanah Hijaz (Arab Saudi) akan membasmi tradisi islam yang tidak sesuai dengan faham Wahabi yang dianutnya. Usulan dari Komite Hijaz yang dibentuk KH Wahab

Hasbullah untuk memohon beberapa hal kepada Raja Saud ditolak karena Komite Hijaz dianggap tidak mewakili umat Islam, maka dibentuklah Nahdlatul Ulama sebagai wadah Islam *Ahlussunnah Wal Jamaah* di Tanah Nusantara (Fathoni dan Zen, 1992 : 8-11)

Nahdlatul Ulama dalam sejarah tercatat pernah terlibat dalam politik praktis dengan bergabung dengan Masyumi pada awal masa kemerdekaan dan NU menjadi partai politik pada 1 Mei 1952. Partai NU pada masa orde baru dileburkan bersama partai berbasis Islam lainnya di dalam Partai Persatuan Pembangunan. Namun pada Mukhtar NU Ke-27 yang dilaksanakan pada 8-12 Desember 1984 di Situbondo menghasilkan rumusan naskah Khittah Nahdliyah atau Khittah Nahdlatul Ulama, yang menegaskan bahwa NU sebagai organisasi sosial keagamaan tidak berafiliasi dengan organisasi dan partai politik manapun. Sikap NU terhadap politik adalah netral dan aktivitas NU dikonsentrasikan pada penggarapan bidang-bidang sosial keagamaan.

Sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tidak boleh bertentangan dengan apa yang menjadi keputusan dari Nahdlatul Ulama. IPNU memiliki AD/ART sendiri dalam menjalankan rumah tangganya. Namun dalam menjalankannya keduanya selalu dalam satu kesatuan dengan berjalan secara beriringan. IPNU memusatkan kegiatan dalam bidang pendidikan dan latihan pengkaderan seperti *Basic Training*, *Intermediate Training*, dan latihan ketrampilan lainnya.

Tahun 2018 di Indonesia diselenggarakan Pilkada Serentak guna memilih calon kepada daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat

Propinsi. Jawa Tengah adalah yang menjadi salah satu propinsi yang menyelenggarakan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2018-2023. Pilkada diikuti oleh dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Ganjar Pranowo - Taj Yasin Maimoen dan Sudirman Said - Ida Fauziah.

Kedua Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Pertama adalah Hj. Ida Fauziah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam struktural Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hj. Ida Fauziah menjabat sebagai Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) periode 2015-2020. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Umum Fatayat NU periode tahun 2010-2015. Hj. Ida Fauziah sebagai calon wakil gubernur mendampingi Sudirman Said yang didukung oleh PKB, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB. Kedua adalah H. Taj Yasin Maimoen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia adalah putra dari Mutasyar PBNU, KH Maimoen Zubair, H. Taj Yasin maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP, PPP, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Nasdem.

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang mengurus IPNU di tingkat Propinsi Jawa Tengah melibatkan diri dalam pemilihan calon Gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah 2018. PW IPNU terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh cawagub Hj. Ida Fauziah. Kegiatan yang paling menonjol yang menunjukkan dukungan PW IPNU kepada Hj Ida Fauziah adalah dengan diselenggarakannya Konsolidasi PW

IPNU IPPNU Jawa Tengah dengan Hj. Ida Fauziah pada 21 Januari 2018 di Hotel Pandanaran, Semarang. Dalam kegiatan tersebut ketua PW NU Jawa Tengah, Ferial Farhan menyatakan dukungan kepada Hj. Ida Fauziah untuk menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Selain itu PW IPNU Jawa Tengah juga dilibatkan dalam Diskusi Rebonan di Markas Perjuangan Merah Putih (Tim sukses Dirman-Ida) pada 7 Februari 2018 bersama berbagai organisasi pemuda di Jawa Tengah lainnya. Kemudian dalam kegiatan Sahur Bareng Cak Imin bersama Aktivistis NU Jawa Tengah, PW IPNU, PC IPNU Se-Semarang Raya, hingga PKPT IPNU di Jawa Tengah juga diikuti sertakan dalam kegiatan. Kegiatan itu adalah safari dari ketua umum PKB untuk mensukseskan Hj. Ida Fauziah sebagai wakil gubernur, yang juga dihadiri oleh ketua PW NU Jawa Tengah, Menristek Dikti, dan Menakertrans yang merupakan mentei dari PKB.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sikap politik pengurus IPNU dalam tingkat propinsi menjadi penting guna melihat sejauh mana generasi muda NU bersikap di dalam politik khususnya pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 dan mengetahui sejauh mana kesadaran pemuda NU terhadap adanya khittah NU yang menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi NU. Kajian mengenai keterlibatan badan otonom Nahdlatul Ulama dalam politik masih minim dilakukan. Sehingga belum ada kejelasan mengenai bagaimana kenyataan di lapangan soal pelaksanaan khittah NU oleh badan otonom NU. IPNU yang merupakan badan otonom NU sekaligus wadah pengkaderan awal di dalam Nahdlatul Ulama, maka dalam

pengkaderan harus benar-benar selaras dengan Nahdlatul Ulama, salah satunya pemahaman di dalam politik praktis, IPNU harus memahami mengenai khittah NU dan mampu bersikap sesuai dengan khittah NU. Uraian latar belakang diatas akan ditindaklanjuti dengan dilakukannya penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Sikap Politik PW IPNU Terhadap Khittah NU Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dengan di tambah berbagai data tabel yang disajikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Sikap Politik Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terhadap khittah NU dalam kaitannya dengan kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 ?
2. Bagaimana keterlibatan Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sikap Politik PW IPNU Jawa Tengah terhadap Khittah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018
2. Untuk mengetahui keterlibatan PW IPNU Jawa Tengah pada pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat yang baik dan positif secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis adalah kegunaan untuk mengembangkan ilmu / kegunaan teoretis. Manfaat teoretis dari Sikap Politik PW IPNU Terhadap Khittah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 adalah dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian politik lokal yang memuat pengetahuan tentang sikap politik organisasi kepemudaan di Indonesia khususnya IPNU.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangan kajian yang dapat dipelajari oleh masyarakat untuk memahami realitas politik dari organisasi IPNU sebagai organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan.
- b. Bagi IPNU, penelitian ini dapat menjadi acuan bersikap organisasi IPNU di berbagai tingkatan kepengurusan dalam menghadapi pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah, sehingga dapat bersikap politik dan melangkah sesuai dengan garis pedoman organisasi.

1.5 Batasan Istilah

Penelitian ini menjelaskan beberapa batasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian dengan maksud agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam judul. Maka dibentuklah batasan-batasan yang jelas mengenai istilah kunci dalam rumusan masalah, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kealahan penafsiran sehingga penelitian dapat terarah. Adapun batasan istilah tersebut sebagai berikut :

1.5.1 Sikap Politik

Pengertian sikap politik dalam penelitian ini adalah reaksi yang dimunculkan oleh pimpinan wilayah IPNU Jawa Tengah yang merespon adanya pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018.

1.5.2 Khittah NU

Khittah adalah garis. Khittah NU berarti garis-garis yang sejak awal telah menjadi pedoman kegiatan para ulama pendiri organisasi NU yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah naskah yang dipakai secara keberlanjutan pada Muktamar NU dke-27 di Situbondo yang berhasil mengesahkan rumusan kongkrit Khittah NU. Khittah memiliki fungsi sebagai landasan sikap, berfikir, dan bertindak bagi segenap warga NU secara individu ataupun secara organisatoris kolektif dalam pengambilan keputusan. Substansi Khittah NU dalam pedoman baku adalah faham *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan yang ada di Indonesia (Muzadi, 2007 :41-42). Khittah NU memberikan warga NU

pedoman dalam bertindak di dalam berbagai bidang diantaranya adalah dalah faham keagamaan, sikap kemasyarakatan, perilaku yang dilakukan atas dasar keagamaan, Ikhtiar-Ikhtiar Nahdlatul Ulama, fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama, dan Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa.

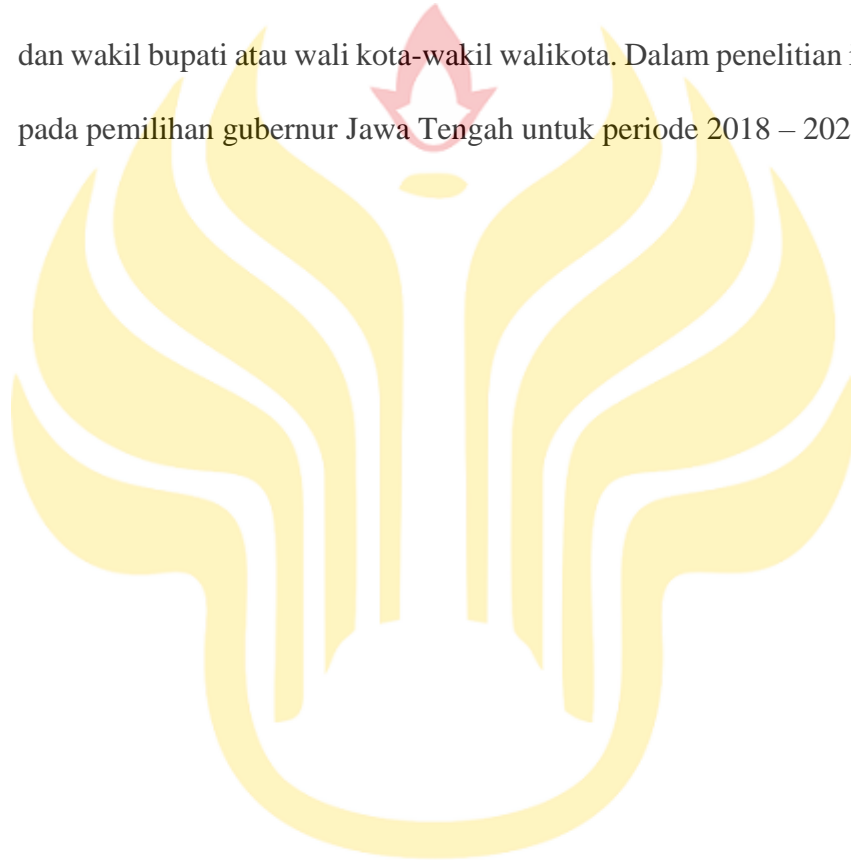
Khittah NU menggariskan kepada NU sebagai gerakan sosial-keagamaan dalam bentuk rumusan-rumusan dasar (Nurhasim dan Ridwan, 2004 : 57). Khittah NU membawa NU kembali pada cita-cita awal Nahdlatul Ulama untuk memfokuskan diri pada bidang sosial-keagamaan, bukan pada gerakan politik praktis. NU bukanlah organisasi politik dan tidak terikat dengan organisasi politik manapun. Khittah NU pada penelitian ini menjadi pedoman bagi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam menjalankan organisasinya berkaitan dengan sikap politik yang dijalankan pada masa pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur.

1.5.3 Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU)

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi Badan Otonom dari Nahdlatul Ulama yang mewadahi para pelajar NU hingga batas usia 27 tahun. Kepengurusan organisasi IPNU pada tingkat propinsi disebut sebagai Pimpinan Wilayah IPNU. Penelitian ini dilakukan pada jajaran pengurus pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama propinsi Jawa Tengah masa bakti 2016-2019.

1.5.4 Pemilihan Gubernur

Pilkada atau Pemilihan Kepala daerah merupakan ajang untuk menentukan pemimpin untuk periode lima tahun. Pilkada memilih calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan/atau pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota-wakil walikota. Dalam penelitian ini berfokus pada pemilihan gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018 – 2023.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sikap Politik

2.1.1.1 Sikap

Louis Thursone, dkk menyatakan bahwa sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi dari sebuah perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Therstone memformulasikan sikap sebagai derajat afektif atau afek negative terhadap suatu objek psikologis. Chave, dkk menyatakan bahwa sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu (Azwar, 2016 : 5). Kesiapan yang dimaksud adalah kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan dalam suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

Wibowo (2015:50) merumuskan sikap pada hakikatnya adalah sebagai kecenderungan pernyataan yang dimiliki oleh setiap orang, dapat berupa menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang menjadi cerminan bagaimana merasa tentang suatu objek atau kejadian dalam lingkungannya. Selain itu, Secord & Backman (dalam Azwar, 2016 : 5) juga mempunyai definisi tentang sikap, yaitu sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

Sikap merupakan konsep yang membantu memahami tingkah laku. Sejumlah perbedaan tingkah laku dapat merupakan pencerminan atau manifestasi dari sikap yang sama (Ladini, 2016: 15).

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan perilaku atau tingkah laku yang muncul karena respon terhadap situasi sosial pada suatu objek sehingga memunculkan keberpihakan atau ketidakberpihakan kepada suatu objek atau kejadian yang terjadi dalam lingkungannya..

Sikap memiliki struktur komponen, cara pembentukan, pengukuran serta fungsi sebagai berikut :

1) Struktur Sikap

Struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif (*cognitive*), komponen afektif (*affective*), dan komponen behavioral. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, yaitu berupa keyakinan atau gagasan yang dimiliki mengenai suatu objek atau situasi. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut emosional yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Komponen Behavioral menunjukkan bagaimana seseorang mengharapkan bertindak terhadap suatu hal (Wibowo, 2015:50-51).

2) Pembentukan Sikap

Pembentukan sikap sosial dimulai dari adanya interaksi sosial yang didalamnya terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara individu satu dengan lainnya dan hubungan timbal balik yang mempengaruhi pola perilaku

individu sebagai anggota masyarakat. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam individu (Azwar, 2016 :30).

3) Pengukuran Sikap

Pengukuran dan pemahaman mengenai sikap harus mencakup beberapa dimensi, seperti yang ditunjukkan oleh Sax (Azwar, 2016: 87-89) dimensi atau karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :

a) Arah

Sikap terbagi dalam dua arah yaitu arah positif dan arah negatif. Sikap setuju berarti memiliki arah positif dan tidak setuju berarti arah negatif, sikap mendukung berarti positif dan sikap tidak mendukung berarti arah negatif, sikap memihak berarti arah positif dan tidak memihak terhadap sesuatu atau seseorang sebagai objek berarti sebuah arah negatif.

b) Intensitas

Intensitas berarti kedalaman atau kekuatan sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak berbeda. Dua orang yang sama-sama tidak setuju terhadap suatu hal (berarah negatif) tapi intensitasnya belum tentu sama, orang pertama dapat dimungkinkan tidak setuju dan orang kedua sangat tidak setuju, begitu juga sikap yang positif, seseorang bisa setuju dan orang lainnya sangat setuju.

c) Keluasan

Keluasan maksudnya adalah kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu objek dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan sangat spesifik, ataupun kepada banyak aspek yang ada pada objek sikap.

d) Konsistensi

Konsistensi maksudnya adalah kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap objek sikap termaksud. Konsistensi sikap dapat dilihat dengan kesesuaian sikap antar waktu, sikap yang diperlihatkan dari waktu ke waktu. Selain itu konsistensi juga dilihat dari kesesuaian sikap dengan perilaku yang ditunjukkan.

e) Spontanitas

Dimensi yang terakhir adalah spontanitas. Seorang individu dituntut untuk dapat menyatakan secara spontan disertai dengan pertimbangan dan alasan yang sesuai.

4) Ciri-ciri dan Fungsi Sikap

Menurut Ahmadi (2007 : 164) sikap akan menentukan jenis tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, orang-orang, atau kejadian-kejadian. Ciri-ciri sikap yang pertama adalah dapat dipelajari. Proses pembelajaran terhadap sikap dapat terlaksana tanpa disengaja dalam memahami sesuatu hal yang akan membawa seseorang untuk bertindak yang lebih baik, membantu tujuan kelompok atau memperoleh sesuatu nilai yang bersifat individu. Ciri sikap yang kedua adalah memiliki kestabilan. Setelah dipelajari, sikap selanjutnya menjadi dorongan untuk menjadi lebih kuat, stabil,

dan melalui pengalaman. Ketiga, sikap merupakan persoalan-persoalan signifikan. Seseorang merasa orang lain menyenangkan, maka orang tersebut akan dianggap berarti. Keempat, sikap berisi kognisi atau sikap yang factual / nyata dan afeksi.

Ahmadi (2007 : 165) membagi fungsi sikap menjadi empat golongan. Pertama, sikap adalah alat untuk menyesuaikan diri. Sikap menjadi hal yang membantu seseorang dalam menyesuaikan tempat dan konsisi yang baru karena sifatnya yang komunikatif sehingga menjadi milik bersama. Kedua, sikap sebagai kontrol tingkah laku yang dapat muncul secara spontanitas. Ketiga, sikap berfungsi sebagai alat pengukur pengalaman-pengalaman seseorang, baik dari dalam dirinya sendiri ataupun dari luar dirinya. Keempat, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian seseorang sehingga sikap dapat melihat objek-objek tertentu.

2.1.1.2 Politik

Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*) (Budiardjo, 2008:13).

Andre Heywood (Budiardjo, 2008 : 16) mendefinisikan politik sebagai kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen, peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*politics is the activity through wich a people make, preserve and amend the general rules under which*

they live and such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation).

Rod Hague et al (Budiardjo, 2008 : 16) juga memiliki pengertian sendiri untuk politik, yaitu sebagai kegiatan yang menyangkut bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya (*politics is the activity by which group reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members*).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa politik merupakan usaha untuk mencapai kesepakatan untuk menggapai tujuan yang baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Politik secara umum dimengerti oleh masyarakat umum adalah yang berkaitan dengan pemilihan umum. Hal tersebut dimakhlumi karena pada saat pemilu masyarakat dapat merasakan langsung proses-proses politik mulai dari sosialisai politik, komunikasi politik, kampanye, hingga turut serta memberikan partisipasi politiknya.

Menurut Dhakiri (2014 : 7) berpolitik bagi warga NU salah satunya dapat dilihat dari perspektif *maslahah* atau asas manfaat, berpolitik adalah mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat banyak untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Menjadi politisi adalah menjadi tempat bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi dan artikulasi politiknya. Berpolitik adalah menyerahkan hidup secara total untuk kepentingan umat di dunia dan akhirat.

2.1.1.3 Sikap Politik

Pengertian sikap politik adalah sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan adanya sikap politik maka akan dapat muncul gambaran perilaku politik apa yang akan muncul (Sastroatmodjo, 1995 : 4)

Sikap politik tergantung dari persoalan-persoalan para pemimpin, gagasan-gagasan, lembaga-lembaga dan peristiwa-peristiwa politik. Walaupun sikap lebih abadi dari pikiran atau suasana hati yang fana, namun sikap cenderung berubah sesuai berlakunya waktu dan dengan berubahnya keadaan dan cenderung dipengaruhi oleh berbagai macam motif (karena sikap itu sifatnya insidensial) tergantung dari kondisi atau peristiwa yang mendukung dan melatarbelakanginya (Afriana, 2016 : 25)

Sikap politik selanjutnya berkaitan dengan sosialisasi politik. Surbakti (2010 : 149) menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik kepada anggota masyarakat. Hasil yang didapat adalah berupa orientasi pilihan masyarakat pada pemilihan umum dan perilaku masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya pada orientasi politik yang sama.

Sosialisasi politik juga membahas bagaimana kekuasaan didistribusikan di dalam masyarakat, pemerintahan suatu negara diselenggarakan, otoritas kekuasaan diaplikasikan, pola-pola pengaturan pencapaian kekuasaan, dan di dalam masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2013 : 22). Penguasa melakukan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemerintahan yang dijelankannya, sehingga program-program pemerintah dapat tersampaikan dan berjalan dengan baik pada masyarakat.

Sostroatmodjo (1995 : 5) menyatakan bahwa konsep sikap dapat dihubungkan dengan politik, sehingga sehingga seseorang atau kelompok dapat melakukan sikap politiknya. Seseorang atau kelompok dapat menyatakan presepsi dengan berbagai bentuk, sebagai respon terhadap masalah-masalah yang terjadi.

Bentuk sikap dapat dicontohkan saat ada gelaran pemilihan umum. Para calon yang sedang berkontestasi saling beradu strategi untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Mereka mendekati berbagai organisasi, kelompok, dan elemen yang ada di dalam masyarakat. Merespon hal tersebut ada seseorang atau kelompok yang bersikap mendukung salah satu calon dengan berbagai bentuk dukungan, ada yang menyatakan kekecewaan dengan salah satu calon karena tindakan yang dilakukan, ada pula ada yang memilih bersikap untuk diam. Diam dapat dikategorikan sebagai salah satu sikap politik, karena diam tidak berarti bahwa seseorang atau kelompok tersebut tidak memiliki penghayatan terhadap peristiwa yang terjadi. Diam dapat berarti, mendukung, dapat berarti menolak, dan dapat berarti netral, akan tetapi seseorang atau kelompok tersebut merasa tidak berdaya untuk menyatakan sikap mereka tersebut.

Struktur sikap politik dapat kita relevansikan dengan peristiwa politik yang akan penulis teliti yaitu pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Struktur sikap politik yang pertama adalah komponen kognitif, yaitu berupa presepsi, kepercayaan, dan *stereotype* yang dimiliki oleh seorang individu terhadap tokoh – tokoh yang maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 beserta partai-partai pendukungnya. Kedua, komponen afektif yaitu terkait dengan masalah emosional subjektif perasaan terhadap para calon yang maju pada

pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Ketiga, komponen konatif atau kecenderungan perilaku dalam diri seseorang terkait dengan persepsi, kepercayaan, dan stereotype yang dimiliki individu mengenai para kandidat calon gubernur Jawa Tengah tahun 2018.

2.1.2 Perilaku dan Partisipasi Politik

Sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, serta dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. Pertama yaitu perilaku tidak banyak ditentukan oleh umum, melainkan sikap spesifik pada suatu hal. *Kedua*, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga norma-norma subjektif yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat. *Ketiga*, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intense atau niat untuk berperilaku tertentu (Leek Ajzen dan Martin Fishbein dalam Amir, 2014:34).

Sikap politik sebagai kesiapan awal sebelum munculnya perilaku politik. Perilaku politik merupakan interaksi antara aktor-aktor politik baik masyarakat, pemerintah, dan lembaga dalam proses politik. Paling tidak dalam proses politik ada pihak yang memerintah, ada yang menentang dan ada yang mentaati serta mempengaruhi dalam proses politik, baik dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan kebijakan. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 2010:20).

Perilaku politik yang muncul merupakan hasil dari pengaruh beberapa faktor. Pertama adalah factor lingkungan sosial politik tak langsung, seperti system politik, system ekonomi, system budaya dan media massa. Kedua adalah lingkungan sosial politik langsung yang memebentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan dengan memeberikan sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat serta pengalaman-pengalaman hidup. Ketiga adalah kepribadian yang tercermin pada sikap individu yang tercermin pada tiga basis fungsional sikap yaitu kepentingan, penyesuaian diri, dan eksternalisasi dan pertahanan diri. Keempat adalah faktor sosial politik langsung yang berupa situasi cuaca, keadaan keluarga, dan ancaman dengan segala bentuknya (Sastroatmodjo, 1995:14).

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya demokrasi karena menjadi ciri dari modernisasi politik. Keputusan yang diambil oleh pemerintah akan berpengaruh pada kehidupan warga negara, maka warga negara berhak untuk turut serta menentukan keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah. Maka partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti (2010:180) adalah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik

Gabriel A. Almond dalam Mas'oed (2008:57-58) membedakan bentuk partisipasi politik menjadi dua yaitu konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik dalam bentuk konvensional diantaranya adalah pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan

administrative. Partisipasi politik dalam bentuk non-konvensional yaitu berupa pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran, dll), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) serta perang gerilya dan revolusi.

2.1.3 Khittah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa Islam terbesar di dunia pernah masuk dalam perhelatan dunia politik praktis (Masduqi, 2006 : 18). Nahdlatul Ulama menjadi partai politik dan pertama kali turut serta sebagai peserta Pemilu pada pemilihan umum tahun 1955. Hasil suara yang diperoleh begitu signifikan untuk sebuah partai baru dalam pemilihan umum. Partai NU mendapatkan suara sebesar 18,4% dari jumlah suara yang sah dan berhak menempati posisi ke empat.

Nahdlatul Ulama sebagai partai politik memperjuangkan politik praktis. Hal tersebut melenceng jauh dari tujuan awal didirikannya Nahdlatul Ulama, yaitu sebagai untuk mengurus urusan sosial keagamaan (Nurudin dan Dalhar, 2016 : 159). Berangkat dari hal tersebut membawa sekelompok ulama dan intelektual Nahdlatul Ulama untuk merumuskan kembali konsep Khittah NU 1926 atau Khittah Nahdliyah yang bertujuan untuk mengembalikan Nahdlatul Ulama pada jalur yang sebagaimana mestinya sesuai tujuan awal didirikan.

Khittah berarti garis. Khittah NU berarti garis-garis yang sejak semula menjadi pedoman kegiatan para ulama pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian dirumuskan menjadi pedoman berkelanjutan, rumusan tersebut berhasil disusun

secara kongkrit dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Menurut Nurudin dan Dalhar (2016 : 161) garis-garis tersebut berlaku sebagai “landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi dalam setiap pengambilan keputusan”. Rumusan tersebut menegaskan bahwa pikiran, sikap, dan tindakan warga NU atau nahdliyin harus selaras dengan Khittah tersebut. Termasuk dalam pengambilan keputusan harus dengan prosedur dan proses yang sesuai dengan khittah NU, serta keputusan yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan khittah NU. Sementara substansi khittah NU adalah faham *Ahlissunnah Wal Jamaah* yang diterapkan menurut kondisi masyarakat Indonesia, hal tersebut meliputi dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan (Muzadi, 2006 : 41). Sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia tidak dimaknai dengan mengubah doktrin Islam dengan mengubah teks-teks agama kedalam Bahasa Indonesia melainkan bagaimana menumbuhkan ajaran Islam dalam konteks budaya masyarakat sebagaimana realitas bangsa Indonesia yang beragam. Adapun naskah lengkap Khittah Nahdlatul Ulama hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo (DZ, 2011 : 101-113) adalah sebagai berikut :

1) Mukaddimah

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Dengan bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling bantu membantu, dan keseia-sekataan merupakan pra-syarat dari tumbuhnya persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata-kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut –pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H

/ 31 Januari 1926 dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah* dan menganut salah satu madzhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah An Nu'man, Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal; serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil, dan sejahtera.

Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut sebagai Khittah Nahdlatul Ulama.

2) Pengertian

- a) Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam proses pengambilan keputusan
- b) Landasan tersebut adalah faham *Ahlussunnah wal Jamaah* yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan
- c) Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.

3) Dasar-dasar Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama

- a) Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber Islam: *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Al-Ijma'* dan *Al-Qiyas*.
- b) Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut diatas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham *Ahlussunnah wal Jamaah* dan menggunakan jalan pendekatan (*al-madzhab*) :

- (1) Di bidang *'aqidah*, Nahdlatul Ulama mengikuti faham *Ahlussunnah wal Jamaah* yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al Asy'ary dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi.
- (2) Di bidang fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (*al-madzhah*) salah satu dai madzhab Abu Hanifah An Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal

- (3) Di bidang *tashawwuf* mengikuti antara lain Imam Al Junaid Al Bugdadi dan Imam Al-Ghazali serta Imam-Imam yang lain.
- c) Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang *fithri*, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.
- 4) Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama
 Dasar-dasar pendirian faham keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang berciri-ciri pada :
- a) Sikap *tawasuth* dan *I'tidal*
 Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim).
- b) Sikap *tasamuh*
 Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hak yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah *khilafiyah*; serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
- c) Sikap *tawazun*
 Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, khidmah kepada sesama manusia seta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.
- d) *Amar ma'rufnahi munkar*
 Selalu memiliki kepekaan untuk mendukung perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.
- 5) Perilaku yang Dibentuk oleh Dasar Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama
 Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan sikap kemasayaakatan tersebut (angka 4) membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi yang :

- a) Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam
 - b) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi
 - c) Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah dan berjuang
 - d) Menjunjung tinggi persaudaraan (*al-ukhuwawah*) persatuan (*al-ittihad*) serta kasih mengasihi
 - e) Meluhurkan kemuliaan moral (*al-akhlakul karimah*) dan menjunjung tinggi kemajuan (*ash-shidqu*) dalam berfikir, bersikap, dan bertindak
 - f) Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa, dan negara
 - g) Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala
 - h) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya
 - i) Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia
 - j) Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakat
 - k) Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara
- 6) Ikhtiar-ikhtiar yang Dilakukan Nahdlatul Ulama

Sejak berdirinya, Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasayarakatan

Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah :

- a) Peningkatan silaturahmi / komunikasi antar ulama
(dalam Statoetoen Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan: mengadakan perhimpunan di antara ulama-ulama yang bermadzab)
- b) Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan / pengkajian / pendidikan
(dalam Statoetoen Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan : memeriksa kitab-kitab sebelomnya dipakai oentoek mengadjar soepaja diketahoei pakah itoe daripada kitab-kitab ahli soennah wal djamaah ataoe kitab-kitab ahli bid'ah; memperbanyak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam)
- c) Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan saran-saran peribadatan dan pelayanan sosial

(dalam Statoetoeen Nahdlatoeel Oelama 1926 disebutkan: menjiarkan agama Islam dengan djalan apa sadja jang halal; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid-masdjid djuga dengan hal ihwalnja anak-anak jatim dang orang-orang jang fakir miskin)

- d) Peningkatan taraf dan kualitas hidup masayrakat melalui kegiatan yang terarah

(dalam Statoetoeen Nahdlatoeel Oelama 1926 disebutkan: mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh Sjara' agama Islam)

Kegiatan-kegiatan yang dipilih Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus dibina hubungan dan komunikasi antar para Ulama sebagai pemimpin masyarakat; serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Sejak semula Nahdlatul Ulamamelihat masalah ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata. Pilihan akan ikhtiar yang dilakukam mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama swadaya masyarakat sendiri. Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa pesatuan dan kesatuan para Ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, da'wah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian dalam masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk merubah masyarakat yang terbelakang, bodoh, dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berkahlak mulia. Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif kepada setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat. Setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.

- 7) Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama di dalamnya

Dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi

tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan, baik untuk tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah yang membawakan faham keagamaan, maka Ulama sebagai matarantai pembawa faham Islam Ahlussunnah wal Jamaah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawasan, dan pembimbing utama jalannya organisasi.

8) Nahdlatul Ulama dan Kehidupan Berbangsa

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, dan makmur yang diridloi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Karenanya setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warganegara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*al-ukhuwah*), toleransi (*at-tasamuh*), kebersamaan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesame warganegara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, Nahdlatul Ulama senantiasa berusaha secara sadar untuk menciptakan warganegara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

Nahdlatul Ulama sebagai *jam'iyah* secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.

Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warganegara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh Undang-

Undang. Di dalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus dilakukan secara bertanggungjawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hokum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

9) *Khotimah*

Khittah Nahdlatul Ulama ini merupakan landasan dan patokan-patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tergantung kepada semangat pemimpin warga Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama hanya akan memperoleh dan mencapai cita-cita jika pemimpin dan warganya benar-benar meresapi dan mengamalkan Khittah Nahdlatul Ulama ini. *Hasbunallah wani'mal wakil. Ni'mal maula wani'man nashir.*

Konsep besar pembangunan politik kebangsaan yang diupayakan oleh Nahdlatul Ulama sesuai dengan naskah Khittah NU tersebut adalah suatu tata kehidupan politik nasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mampu menjamin terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur lahir batin yang menghormati nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, serta mendidik kedewasaan seluruh warga masyarakat dalam mencapai kemaslahatan bersama;
2. Mampu menjamin terpeliharanya agama dan keyakinan keislaman, serta larangan pemaksaan agama, terpeliharanya perkembangan jiwa dan nyawa manusia secara layak dan terhormat, terpeliharanya akal dan pikiran dari setiap bentuk perusakan dan penodaan, terpeliharanya masa depan yang prospektif bagi generasi penerus, serta terpeliharanya kepemilikan harta benda yang sah

3. Mampu menjamin terbentuknya jatidiri dan kepribadian manusia sebagai umat pilihan yang memiliki sifat-sifat : berlaku jujur dan benar; dapat dipercaya dan tepat janji; melaksanakan kewajibandan menerima hak secara proposional serta olong-menolong dalam kehidupan.

Sikap politik dan pandangan politik Nahdlatul Ulama sesuai dengan Khittah Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut :

- Hak berpolitik merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara yang harus dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pelaksanaan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama'ah.
- Pelaksanaan hak berpolitik harus ditempatkan di dalam kerangka mengembangkan kebudayaan politik bangsa Indonesia yang sehat dan bertanggung jawab.
- Praktek berpolitik harus berada dalam kerangka integrasi bangsa dan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
- Praktek berpolitik harus dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, adil sesuai dengan aturan dan norma yang disepakati, serta lebih mengedepankan musyawarah dalam memecahkan masalah ber-sama.
- Praktek berpolitik warga negara, khususnya warga NU yang berbeda aspirasi politiknya harus berjalan dalam suasa persaudaraan, tawadlu dan saling menghargai.
- Potensi organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri, harus diberi ruang yang cukup dan dipupuk agar

memiliki kekuatan yang semestinya dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana kebebasan berkumpul dan berserikat, serta menyalurkan aspirasi.

- Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang agama, NU tidak terikat secara organisatoris dan struktural dengan partai/organisasi politik manapun.
- Keanggotaan warga NU dalam suatu partai/organisasi politik bersifat perseorangan dan setiap warga NU dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui partai/ organisasi politik yang mereka kehendaki, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan Jam'iyah.
- Keterpisahan NU secara organisatoris dengan suatu partai/organisasi politik, diwujudkan antara lain melalui larangan perangkapan jabatan kepengurusan harian partai/organisasi politik manapun dengan kepengurusan harian di lingkungan Jam'iyah NU.

2.1.4 Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang tidak terpisahkan dari generasi muda Indonesia yang senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

IPNU didirikan di Kota Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H Bertepatan pada hari Rabu, 24 Februari 1954 untuk waktu yang tidak terbatas. Pimpinan Pusat IPNU berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia yaitu Jakarta, sementara untuk Pimpinan wilayah berkedudukan di ibukota propinsi. Kehidupan berbangsa dan bernegara IPNU berlandaskan pada Pancasila.

Peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PDPRT) Iktana Pelajar Nahdlatul Ulama menerangkan bahwa IPNU memiliki aqidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalam bidang kalam mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi; dalam bidang fiqih mengikuti salah satu madzab empat imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid Al Ghazali.

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang memiliki fungsi sebagai :

- a. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran;
- b. Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa;
- c. Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam *Ahlissunnah wal Jamaah* untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdliyah;
- d. Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh *ukhuwah* Nahdliyah, *Islamiyah, Insaniyah, dan Wathoniyah*.

Tujuan IPNU adalah untuk terbentuknya peajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya syariat Islam

Ahlussunnah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama memiliki struktur kepengurusan dari pusat hingga tingkat desa / kelurahan. Pimpinan pusat untuk tingkat nasional, disingkat PP. Pimpinan wilayah untuk tingkat propinsi, disingkat PW. Pimpinan cabang untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, disingkat PC. Pimpinan Cabang Istimewa untuk luar negeri, disingkat PCI. Pimpinan anak cabang untuk tingkat kecamatan, disingkat PAC. Pimpinan komisariat untuk lembaga pendidikan tinggi, disingkat PKPT. Pimpinan komisariat untuk lembaga pendidikan, disingkat PK. Pimpinan ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenisnya, disingkat PR. Pimpinan anak ranting untuk tingkat komunitas atau kelompok tertentu dalam ruang lingkup desa atau kelurahan, disingkat PAR.

Pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Jawa Tengah memiliki 35 pimpinan cabang, yaitu 29 Kabupaten, 5 Kota, dan 1 daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota. PW IPNU Jawa Tengah dipimpin oleh seorang ketua dan 7 wakil di berbagai bidang, yaitu bidang organisasi, kaderisasi, dakwah, jaringan sekolah dan pondok pesantren, jaringan eksternal dan SDM, komunikasi dan informasi, serta bidang olahraga dan seni budaya.

Setiap anggota IPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai akidah, azas, tujuan, dan/atau usaha yang bertentangan dengan akidah, azas, tujuan, dan/atau usaha IPNU yang dapat merugikan IPNU. Semua kader IPNU dalam menjalankan kegiatan pribadi atau berorganisasi

harus tetap berpegang teguh nilai-nilai yang diusung norma dasar keagamaan Islam *Ahlissunnah wal jamaah* dan norma yang bersumber dari masyarakat. Adapun landasan bersikap IPNU berdasarkan keputusan kongres XVI tahun 2009 tentang Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut :

1) Diniyyah / Keagamaan

- a) Tauhid (*at-tauhid*) merupakan keyakinan yang kokoh terhadap Allah SWT. sebagai sumber inspirasi berfikir dan bertindak;
- b) Persaudaraan dan persatuan (*al-ukhuwah wa al-ittihat*) dengan mengedepankan sikap mengasihi (*welas asih*) sesama makhluk
- c) Keluhuran moral (*al akhlaq al karimah*) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran (*al shidqu*). Bentuk kebenaran dan kejujuran yang dipahami : (1) *Al-shidqu il Allah*. Sebagai pribadi yang beriman selalu melandasi diri dengan perilaku benar dan jujur, karena setiap tindakan seanehtiasa dilihat oleh sang *Khalik*; (2) *Al-shidqu ila ummah*. Sebagai mkhluk sosial dituntut memiliki kesalehan sosial, jujur dan beannr kepada masyarakat; (3) *Al-shidqu ila nafsi*. Jujur dan benar kepada diri sendirimerupakan sikap perbaikan diri dengan semangat peningkatan kualitas diri; (4) *Amar ma'ruf nahi munkar*. Sikap untuk selalu menyerukan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran.

2) Kelilmuan, Prestasi, dan Kepeloporan

- a) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semangat penigkatan kualitas SDM IPNU dan menghargai para ahli dan sumber pengetahuan secara proposional.

- b) Menjunjung tinggi nilai-nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian ibadah kepada Allah SWT.
 - c) Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat.
- 3) Sosial Kemasyarakatan
- a) Menjunjung tinggi kebersamaan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semangat mendahulukan kepentingan public daripada kepentingan pribadi.
 - b) Selalu siap mempelopori setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Keikhlasan dan Loyalitas
- a) Menjunjung tinggi keikhlasan dalam berjuang dan berkhidmah
 - b) Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa, dan negara dengan melakukan ikhtiar perjuangan dibawah naungan IPNU.

2.1.5 Pemilihan Gubernur

Pemilihan Gubernur sering disebut sebagai Pilkada atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Kepala daerah merupakan jabatan politik dengan tugas menjalankan roda pemerintahan daerah. Kepala daerah juga merupakan jabatan public yang menjalankan tugas membuat dan melaksanakan kebijakan public untuk kepentingan rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilihan kepala daerah merupakan suatu prosedur dalam demokrasi dengan berbagai fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, diantaranya adalah : fungsi legitimasi politik, melalui pemilihan umum keabsahan penyelenggaraan negara ditegakkan begitu pula

dengan program dan kebijakan yang dihasilkan; fungsi pemilihan / penentuan penyelenggara negara oleh rakyat secara langsung, baik itu badan eksekutif maupun legislative; fungsi mekanisme sirkulasi elit politik yang berlangsung secara damai; fungsi penjatuhan sanksi politik oleh rakyat kepada penyelenggara negara yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan jalan tidak memilihnya kembali dalam pemilihan umum; dan fungsi pendidikan politik bagi rakyat (Panjaitan, 2016 : 210-211)

Landasan konstitusi dilaksanakannya pemilihan kepala daerah adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 nomor (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Sejak tahun 2015 telah ditetapkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara langsung dengan pemilihan umum kepala daerah. Penyelenggara pemilihan umum kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD). Sementara peserta adalah pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dasar hukum dilaksanakannya Pilkada serentak adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya penyelenggaraan pilkada serentak diatur

pada PKPU Nomor 1 - 5 tahun 2017 tentang Pilkada Serentak Tahun 2018, adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- b. PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- d. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- e. PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017, pendaftaran calon kepala daerah dimulai tanggal 8 hingga 10 Januari 2018. KPU mulai melakukan verifikasi pasangan calon, apakah pasangan calon kepala daerah lolos atau tidak untuk menjadi kandidat calon pada tanggal 10-27 Januari 2018. Pengumuman pasangan calon yang lolos verifikasi dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 13 Februari 2013.

Setiap pasangan calon kepala daerah diberikan waktu untuk kampanye pada tanggal 15 Februari hingga 26 Juni 2018. Pada rentang tanggal tersebut KPU juga menyelenggarakan debat public antar pasangan calon yang maju dalam pilkada di daerah masing-masing. Masa tenang dilakukan selama tiga hari sebelum tanggal pemungutan suara 27 Juni 2018. Rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal 28 Juni – 9 Juli 2018.

Syarat pencalonan sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 4 untuk calon Gubernur dan calon wakil gubernur adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia pada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI; minimal berusia 30 tahun; berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; sehat jasmani dan bebas narkoba; tidak pernah sebagai terpidana sesuai dengan ketetapan hukum yang tetap dari pengadilan; bagi mantan terpidana wajib mengakui di hadapan public; bukan mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak; tidak sedang dicabut hak pilihnya; menyerahkan daftar kekayaan pribadi; tidak sedang dalam tanggungan hutang yang merugikan keuangan negara; tidak sedang dinyatakan pailit; memiliki NPWP; belum pernah menjabat gubernur atau wakil gubernur selama dua periode; belum pernah menjabat sebagai pimpinan yang lebih tinggi; harus mengundurkan diri dari jabatan gubernur atau wakil gubernur I yang mencalonkan diri kembali di daerah lain; mengambil cuti bagi yang mencalonkan kembali di daerah yang tetap; mundur dari jabatan TNI / POLRI / PNS / kepala desa; mundur dari pegawai BUMN / BUMD / badan lain yang sumber keuangannya dari negara; dan berhenti dari anggota KPU / BAWASLU / PANWAS. Setiap pasangan calon yang maju melalui

partai politik wajib diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik minimal 20% jumlah kursi DPRD atau 25 % perolehan suara pada Pemilu sebelumnya.

2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Skripsi dengan judul Sikap Politik Elit NU Pasca Kembali Ke Khittah di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 1984-1998. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 oleh Faizal Imam dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elit NU mengambil sikap untuk bergabung pada Golongan Karya sebagai strategi supaya dapat masuk dalam sistem dan suara Nahdlatul Ulama dapat didengarkan oleh penguasa. Elit NU yang bertahan di PPP menganggap bahwa PPP adalah partai yang berlandaskan Islam yang harus tetap dipertahankan. Dampak positif dari sikap Elit NU yang banyak bergabung di Golkar adalah menjadikan hubungan warga Nahdliyin dengan pemerintah menjadi membaik dan membuat NU semakin berkembang menjadi organisasi yang lebih maju. Dampak negatif yang timbul adalah menurunnya jumlah suara PPP secara drastis. Penelitian tersebut mengambil objek elit politik NU di Wonosobo dengan sikap yang tetap bersama pemerintahan dan tidak bersama partai pemerintah, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, objek yang diambil adalah organisasi Ikatan Pelajar NU yang menjadi gambaran kaum muda NU dan juga pemilihan pemula pada penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018.

Skripsi dengan judul Perempuan NU dan Pilkada (Studi Terhadap Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat NU Terhadap Pasangan Indah

Putri Indiani - Thahar Rum di Pilkada Serentak 2015). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 oleh Ahmad Aufa Zaenal dari Fakultas Ushuludin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Muslimat NU secara tegas mendukung pasangan Indah Putri Indiani - Thahar Rum, sementara Fatayat NU ragu-ragu dalam menyatakan dukungan. Memberikan dukungan pada Pilkada adalah hak individu, walaupun dalam naungan organisasi yang sama bukan berarti setiap anggotanya memiliki pilihan yang sama. Muslimat NU dan Fatayat NU memberikan dukungan kepada Indah Putri Indiani - Thahar Rum dengan tujuan sebagai pembelajaran politik bagi anggotanya, yaitu dengan memberikan dukungan politik melalui kampanye politik dan mendoakan agar menjadi Bupati, serta dengan mealkukan kontrak politik berupa pengajian bulanan, kesejahteraan guru TPA/TPQ, santunan anak yatim dan lansia, serta hadir dalam setiap kegiatan hari besar NU dan Muslimat NU. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena memiliki objek yang hampir sama yaitu organisasi badan otonom NU, penelitian tersebut mengambil objek Muslimat dan Fatayat NU, sementara penulis akan mengambil objek Ikatan Pelajar NU. Penelitian tersebut mengambil latar pemilihan bupati Kabupaten Luwu Utara, sementara penulis akan mengambil latar pemilihan gubernur Jawa Ttengah. Dengan demikian penelilitian yang akan dilakukannpenulis akan melengkapi kajian mengenai keterlibatan badom-banom NU di dalam kontestasi pemilihan umum.

2.3 Kerangka Berfikir

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) adalah pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih pemimpin daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemilihan

umum kepala daerah tingkat I adalah memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur disebut sebagai Pemilihan Gubernur atau Pilgub. Pada Pilkada Serentak 2018, Jawa Tengah menjadi salah satu propinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur untuk periode 2018-2023.

Sikap politik warga NU adalah salah satu penyusun elemen suara dalam pemilihan umum yang sangat dipertimbangkan. Suara NU sebagai ormas Islam dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia semakin menarik untuk diperebutkan dengan maraknya penggunaan isu agama khususnya agama Islam dalam penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan isu agama akhir-akhir ini marak digunakan untuk menyebarkan stigma buruk dalam menjatuhkan lawan politik.

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi masyarakat juga memiliki segmen keanggotaan tua dan muda. Segmen pemuda dalam NU salah satunya adalah diwadahi dengan badan otonom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Anggotanya adalah kader NU pada usia 13-27 tahun. Usia tersebut mewadahi segmen pemilih pemula pada pemilihan umum.

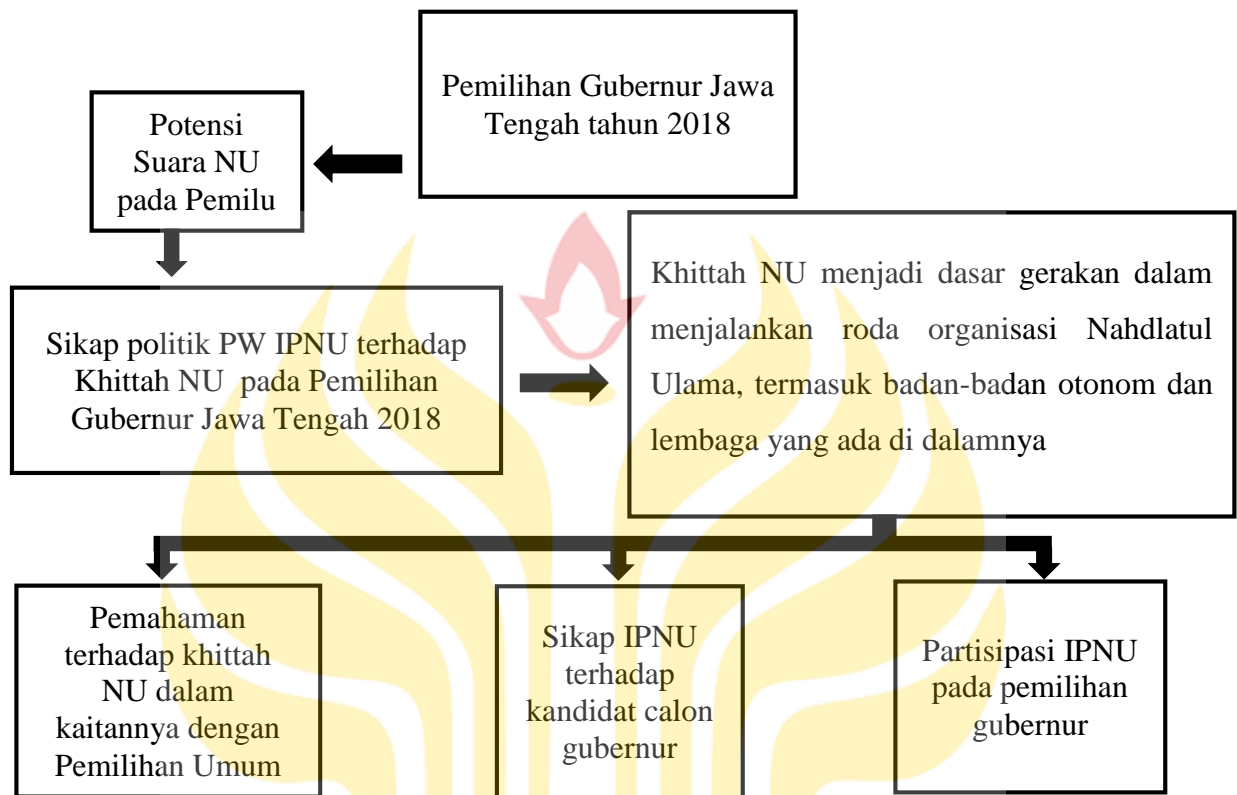
Apabila diperhatikan mungkin Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tidak akan turut serta dalam hiruk pikuk pemilihan umum, hal ini karena kita terjebak pada nama yang dibawa yaitu Pelajar. Padahal jika dilihat dalam usia para anggota IPNU sebagian besar sudah memiliki hak pilih dalam pemilu, dan keorganisasian IPNU yang begitu lengkap dari pusat hingga ke desa-desa tentunya menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam memperoleh suara pada pemilihan umum.

Sebagai kaum intelektual muda NU, pimpinan wilayah IPNU tidak boleh bertindak diam melihat anggotanya tersesat pada politik praktis. Sebagai

pimpinan yang memiliki pengaruh pada tingkat propinsi memiliki sikap tersendiri dalam kontestasi pemilihan umum dalam hal ini pemilihan kepala daerah, inilah yang mendasari pemikiran peneliti untuk menelisik bagaimana Sikap Politik PW IPNU terhadap Khittah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.

Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dari dunia politik. Melihat sejarah organisasi NU juga pernah berubah menjadi Partai NU. Namun NU saat ini telah kembali pada khittahnya dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini berlaku juga bagi seluruh badan otonom yang ada di dalam tubuh NU, salah satunya IPNU. Politik NU bukan lagi politik praktis, melainkan politik kebangsaan. Sikap politik yang dimunculkan oleh badan otonom harus disesuaikan dengan khittah NU yang menjadi pijakan utama dalam berpolitik.

Dengan demikian maka setiap anggota NU di berbagai jenjang harus memahami isi dari khittah NU supaya dalam membawa diri dan organisasi pada masa pemilihan umum kepala daerah tidak melenceng dari garis yang telah ditentukan. PW IPNU sebagai pengurus satu badan otonom NU di tingkat propinsi harus mampu memposisikan diri dengan tepat pada pemilihan gubernur utamanya terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yang turut serta dalam kontestasi. Sebagai generasi muda yang bertanggung jawab terhadap nasib bangsa maka IPNU juga harus turut serta berpartisipasi mensukseskan ajang pemilihan gubernur sesuai dengan kapasitasnya.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Sikap Politik PW IPNU terhadap Khittah NU pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018" dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Jawa Tengah secara organisasi bersikap netral pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, namun pengurus PW IPNU Jawa Tengah bersikap mendukung Hj. Ida Fauziyah sebagai calon wakil gubernur. Hal tersebut dilaksanakan untuk menjaga marwah organisasi dengan menjalankan amanah Khittah Nahdlatul Ulama yang melarang penggunaan organisasi untuk kepentingan politik. PW IPNU Jawa Tengah menjunjung tinggi Khittah NU sebagai landasan berorganisasi bagi organisasi Nahdlatul Ulama beserta badan otonom yang ada di dalamnya.
- b. Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Tengah secara organisasi tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Tetapi pengurus secara perorangan dan secara berkelompok melakukan kegiatan kampanye untuk memenangkan salah satu calon yang berkompetisi yaitu dengan menggalang dukungan dari generasi milenial dengan berbagai macam kegiatan dalam bentuk sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan lapangan yang berupa konser akbar.

- c. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan teori-teori keilmuan khususnya pada kajian ilmu politik yang memuat mengenai sikap politik dari organisasi kepemudaan di Indonesia sekaligus organisasi sosial keagamaan. Hal tersebut dijelaskan dengan pembahasan mengenai keterlibatan pengurus organisasi pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam menghadapi pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi secara lebih intensif supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Tengah dengan Pimpinan Cabang IPNU yang ada di Kabupaten/Kota terkait dengan sikap politik yang diambil.
2. Perjanjian antara pengurus PW IPNU sebagai pendukung dengan Hj. Ida Fauziyah sebagai kader yang didukung harus lebih jelas lagi dan tertulis, tidak hanya dengan kepercayaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku

- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 2016. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Mirriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Dewanto. 2005. *Metodologi Penelitian, tinjauan Filosofis dan Praksis*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Dhakiri, Muh. Hanif. 2013. *Pedoman Berpolitik Warga NU*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- DZ, Abdul Mun'im. 2011. *Piagam Perjuangan Kebangsaan*. Jakarta : Setjen PBNU – NU Online.
- Fathoni, Khoirul dan Muhammad Zen. 1992. *NU Pasca Khittah (Prospek Ukhuwah Dengan Muhammadiyah)*. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- Firmansyah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Mas'oad, Mohtar dan Colin MacAndrews. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Masduqi, KH. Yahya. 2006. *Politik dan Peran Politik Kyai*. Cirebon : MAKTAB.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muzadi, KH. Abdul Muchith. 2007. *NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 65 Th. Ikut NU)*. Surabaya : Khalista.
- Nurhasim, Ahmad dan Nur Khalik Ridwan. 2004. *Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan*. Yogyakarta : Pustaka Tokoh Bangsa.

- Nurudin, Ahmad dan M. Dalhar. 2016. *Ke-NU-an Ahlussunnah wal Jamaah*. Semarang : LP Ma'arif NU Wilayah Jawa Tengah.
- Panjaitan, Merphin. 2016. *Peradaban Gotong Royong*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Pimpinan Pusat IPNU. 2016. *Hasil – Hasil Kongres XVIII IPNU*. Jakarta : Setjen PP IPNU
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ubaid, Abdullah dan Bakir, Mohammad. 2015. *Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Wibowo. 2015. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Skripsi

- Afriana, Lintang Yunita. 2016. *Sikap Politik Anak Punk dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi. Bandar Lampung : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Imam, Faizal. 2015. *Sikap Politik Elit NU Pasca Kembali Ke Khittah di Kabupaten Wonosobo tahun 1984-1998*. Skripsi. Semarang : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

Ladini, Malisa. 2016. *Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

Tesis

Amir, Saiful. 2014. *Perilaku Politik Umat Islam di Kabupaten Karo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013*. Tesis. Medan : Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara

Perundang - undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Jurnal

Mustaqim, Muhamad. 2015. *Politik Kebangsaan Kaum Santri : Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama*. Kudus : Jurnal ADDIN Volume 9 No. 2

Internet

KOMPAS.com. *KPU Jateng Gaet Pemilih Pemula di Pilkada Serentak 2018*. <https://regional.kompas.com/read/2018/01/26/16104131/kpu-jateng-bidik-pemilih-pemula-di-pilkada-serentak-2018> (diakses 25 April 2018)

Lain - lain

Hasil Kongres Ke XVI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Nomor : 04 / Kongres XVI / IPNU / 2009 Tentang Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.